

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan suatu perusahaan pada hakikatnya merupakan salah satu aspek yang tak akan habis untuk dibahas. Irwan (2013) menyatakan bahwa kinerja keuangan pada suatu perusahaan pada hakikatnya merupakan alat ukur bagi investor untuk menilai suatu perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan manajer. Senada dengan pendapat Irwan di atas, Nuswandari (2009) yang menyatakan bahwa kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas suatu perusahaan selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Lianto, et al (2010) juga menyebutkan bahwa laporan keuangan mempunyai peranan penting dalam proses pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan pada hakikatnya merupakan informasi penting yang sangat berpengaruh pada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya investor dan *stakeholder*. Salah satu karakteristik laporan keuangan yaitu *timeliness* (ketepatan waktu pelaporan). Laporan keuangan yang tidak diinformasikan tepat waktu akan berakibat pada hilangnya kepercayaan para pemegang saham maupun pelanggan. Di samping itu, apabila laporan keuangan tidak segera dipublikasikan maka akan berakibat lambatnya keputusan ekonomi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan diantaranya adalah *Corporate Social Responsibility, Intellectual Capital dan Good Corporate*

Governance dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi. Pelaksanaan kegiatan CSR ini dimanfaatkan manajer sebagai tameng atau strategi mempertahankan diri (*entrenchment strategy*) dari tindakannya dalam mengelola laba perusahaan agar reputasi perusahaan dan melindungi karier manajer secara pribadi. Menurut Prior *et al.* (2008) manajer yang memanipulasi pendapatan menggunakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai strateginya untuk menjaga hubungan dan mendapatkan dukungan pemangku kepentingan. Dengan strategi tersebut, manajer akan mengurangi kemungkinan mendapat tekanan akibat ketidakpuasan *stakeholder* yang kepentingannya dirusak dengan adanya praktik manajemen laba. Selanjutnya Prior *et al.* (2008) melaporkan bahwa pengaruh antara manajemen laba dan CSR pada akhirnya akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menyediakan sumber keuangan yang memadai.

Menurut Healy dan Wahlen (1999) dalam (Belkaoui, 2006) manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan pertimbangan mereka dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan. Ketika manajemen tidak berhasil dalam mencapai target labanya, maka manajemen akan melakukan modifikasi dalam pelaporannya dengan cara memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat menunjukkan pencapaian laba yang lebih baik agar memperlihatkan kinerja perusahaan yang baik.

Di Indonesia kasus manajemen laba terjadi pada perusahaan-perusahaan besar. Beberapa kasus besar yang terjadi yaitu pada perusahaan PT Kimia Farma, PT Indofarma, dan PT Ades Alfindo (Sulistiawan *et al.*, 2011). Kasus pada PT Kimia Farma terjadi pada tahun 2002 yakni penyajian terlalu tinggi sebesar Rp32,7 miliar,

dimana 2,3% berasal dari penjualan dan sebesar 24,7% berasal dari laba bersih milik PT Kimia Farma. Kesalahan tersebut berasal dari *overstated* penjualan pada unit industri bahan baku, pada persediaan barang pada unit logistic sentral, pada persediaan barang dagangan, dan pada penjualan.

Kasus PT Ades Alfindo terungkap pada tahun 2004 ketika manajemen baru PT Ades menemukan inkonsistensi pencatatan atas penjualan Periode 2001- 2004. Manajemen melaporkan angka penjualan riil lebih rendah daripada yang sebenarnya terjadi. Hal ini luput karena dalam laporan keuangan yang disajikan PT Ades tidak memasukkan volume penjualan dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Pada tahun yang sama juga PT Indofarma melakukan *overstated* dari nilai yang seharusnya dilaporkan, akibatnya mengacu pada penyajian laba yang lebih tinggi.

Manajemen laba muncul sebagai dampak masalah keagenan yang terjadi karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*). Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterahkan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi (Salno dan Baridwan, 2000). Dalam kondisi seperti ini diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak.

Fenomena yang mendasari penelitian ini menggunakan perusahaan Real Estate dan Property adalah bahwa Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa penjualan rumah jenis residensial mengalami penurunan karena dampak dari kebijakan '*loan to value*' (LTV) atau pembatasan pembayaran uang muka dari 20 persen menjadi 30

persen sejak pertengahan 2012. Penjualan tersebut mengalami penurunan sebesar 46,27 persen dibandingkan pada volume penjualan triwulan sebelumnya. LTV bagi rumah tipe bangunan lebih dari 70 m² ditetapkan sejak September 2013 sehingga penurunan penjualan didominasi oleh rumah tipe besar. Tidak hanya kebijakan LTV ini yang memengaruhi penjualan rumah, tetapi juga lambatnya siklus ekonomi Indonesia menyebabkan orang menunda membeli rumah. Meskipun volume penjualan menurun, harga properti residensial di Jawa Tengah tetap tumbuh. Misalnya, indeks harga properti residensial (IHPR) pada triwulan pertama tahun ini tercatat 168,06 atau meningkat sebesar 1,28 persen dari indeks triwulan sebelumnya yang berada di level 165,93.

Wardhani dan Joseph (2010) menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi manajemen laba antara lain dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Menurut Monks (dikutip dari Kaihatu, 2006) *Good Corporate Governance* (GCG) secara definitif salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi manajemen laba antara lain dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Indonesia melalui KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) mengeluarkan pedoman pelaksanaan *good corporate governance* pada tahun 2006. Adapun asas *good corporate governance* yang tertera pada pedoman KNKG adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan

kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka dan manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau capital yang telah ditanamkan oleh investor (dikutip dari Aji, 2012).

Agar laporan keuangan akuntabel, maka penerapan *Good Corporate Governance* harus benar-benar diperhatikan. Apalagi GCG ini telah teruji keandalannya karena telah dideseminasikan oleh *The Indonesian Institut of Corporate Governance* sejak tahun 2001 (Nuswandari, 2009). Dalam mengembangkan GCG lembaga ini dilandasi oleh pemikiran pentingnya mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan publik telah menerapkan prinsip GCG dan keikutsertaannya dalam program ini secara sukarela.

Dewan komisaris independen memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*, karena merupakan organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan penuh atas pengurusan perusahaan. Dewan komisaris independen merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005). Komite audit merupakan bagian dari dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi kepada dewan

komisaris, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris (Effendi, 2009). Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka *control* terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisasi (Andri dan Hanung, 2007).

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain (Permanasari, 2010). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Faizal (2004), perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen.

Tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR), pada kenyataannya lebih berorientasi pada masyarakat dan bisnis. Perusahaan yang selalu menargetkan profit terhadap bisnisnya apakah dapat pula memberikan tanggung jawab atas hak masyarakat umum, mengingat besarnya pengaruh bisnis yang dilakukan. Menurut Marhun dalam Sueb (2001), apabila perusahaan tidak memperhatikan seluruh faktor yang mengelilinginya, mulai dari karyawan, konsumen, lingkungan dan sumber daya alam sebagai satu kesatuan yang saling mendukung suatu sistem, maka tindakan itu akan mengakhiri eksistensi perusahaan itu sendiri. Tanggung jawab sosial ini dapat diartikan sebagai komitmen industri untuk mempertanggungjawabkan dampak dari operasi atau aktivitas yang

dilakukan perusahaan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menjaga agar dampak tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya.

Manajemen laba ini memberikan fleksibilitas bagi manajer untuk melindungi diri maupun perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Watt dan Zimmerman (1978) dalam Dianita (2010) menetapkan manajemen laba sebagai tindakan manajer dalam menggunakan kebijakan akuntansi terhadap pelaporan angka-angka akuntansi yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya dan menyesatkan pihak investor dalam mengambil keputusan ekonomi dengan adanya angka laba tersebut. Menurut Scott (2003), banyak penyebab yang membuat pihak manajer melakukan manajemen laba, salah satunya yaitu manajer akan berusaha mengatur laba bersih agar dapat memaksimalkan bonus yang diperolehnya. Selain itu, manajer dapat juga mengurangi laba bersih yang dilaporkan agar nilai pembayaran pajak yang lebih kecil. Adanya aktivitas tanggung jawab sosial ini dapat membuat pihak manajemen yang berada dalam perusahaan lebih leluasa untuk melakukan praktik manajemen laba, karena dengan dilakukannya kegiatan CSR akan membuat respon positif dimata investor maupun masyarakat sehingga dapat menutupi kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan pihak manajer.

Dewasa ini perekonomian dunia telah berkembang dengan begitu pesatnya ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi informasi, persaingan yang ketat, dan pertumbuhan inovasi yang luar biasa sehingga mengakibatkan banyak perusahaan mengubah cara bisnisnya. Perubahan proses bisnis dari bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja (*labor based business*) menuju bisnis berdasarkan pengetahuan (*knowledge based business*), sehingga karakteristik utama perusahaan menjadi

perusahaan berdasarkan pengetahuan (Sawarjuwono, 2003). Perusahaan-perusahaan yang menerapkan *knowledge based business* akan menciptakan suatu cara untuk mengelola pengetahuan sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan perusahaan, dengan penerapan *knowledge based business*, maka penciptaan nilai perusahaan akan berubah.

Di Indonesia, fenomena IC mulai berkembang terutama setelah munculnya PSAK No.19 (revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai IC, namun kurang lebih IC telah mendapat perhatian. Tujuan perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan tercermin dari harga sahamnya, semakin meningkatnya perbedaan antara harga saham dengan nilai buku aktiva yang dimiliki perusahaan menunjukkan adanya *hidden value*. Penghargaan lebih atas saham perusahaan dari para investor tersebut diyakini disebabkan oleh modal intelektual yang dimiliki perusahaan.

Appuhami (2007) menyatakan bahwa semakin besar nilai modal intelektual (VAICTM) semakin efisien penggunaan modal perusahaan, sehingga menciptakan *value added* bagi perusahaan. *Physical capital* sebagai bagian dari modal intelektual menjadi sumber daya yang menentukan kinerja perusahaan. Selain itu, jika modal intelektual merupakan sumber daya yang terukur untuk peningkatan *competitive advantages*, maka modal intelektual akan memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan (Abdol mohammadi, 2015). Modal intelektual diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja keuangan. Perusahaan yang mampu memanfaatkan modal intelektualnya secara efisien, maka nilai pasarnya akan meningkat.

Hubungan antara modal intelektual (VAICTM) dengan kinerja keuangan telah dibuktikan secara empiris oleh Firer dan Williams (2003), Belkaoui (2003) dan Tan *et al.* (2007) yang membuktikan modal intelektual berpengaruh positif pada kinerja keuangan. Salah satu area yang menarik perhatian akademisi maupun praktisi adalah terkait dengan kegunaan modal intelektual sebagai salah satu alat untuk menentukan nilai perusahaan (Edvinsson dan Malone 1997). Penelitian Chen *et al.* (2005) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif modal intelektual terhadap nilai pasar dan kinerja perusahaan.

Di Indonesia penelitian tentang modal intelektual diantaranya telah dilakukan oleh Astuti dan Sabeni (2005), Ulum dkk.(2008), Sianipar (2009) dan Solikhah dkk.(2010) yang menemukan bahwa modal intelektual berpengaruh positif pada kinerja keuangan, sedangkan penelitian Kuryanto dan Muchamad (2008) serta Yuniasih dkk.(2010) tidak berhasil membuktikan bahwa modal intelektual berpengaruh positif pada nilai pasar perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina, Yuniarta dan Sinarwati (2015) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Intellectual Capital*, *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan secara parsial. Hasil uji hipotesis secara simultan juga menunjukkan bahwa *Intellectual Capital*, *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Sunarsih dan Mendra (2013) menunjukkan modal intelektual berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan. Solikhah dkk. (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang mampu mengelola sumber daya intelektualnya dengan efisien akan menciptakan *value added* dan *competitive advantage* yang akan bermuara pada

peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Modal intelektual tidak berpengaruh pada nilai pasar perusahaan.

Penelitian Astungkara (2013) hasil pengujian variabel ukuran perusahaan menemukan bahwa, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktek manajemen laba. Pengujian secara simultan menemukan bahwa proporsi dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, modal intelektual secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasinta (2012) hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* yang diprosikan skor CGPI tidak berpengaruh terhadap ROA, skor CGPI berpengaruh positif terhadap ROE, dan skor CGPI tidak berpengaruh terhadap *Tobin's Q*.

Penelitian ini merupakan replika yang dilakukan oleh Kusuma dan Syafruddin (2014) yang berjudul Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Pemoderasi. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Syafruddin (2014) terletak pada variabel independen yaitu *Corporate Social Responsibility* dan variabel dependennya yaitu kinerja keuangan dan manajemen laba. Sedangkan perbedaannya adalah pada obyek penelitian dan periode penelitian yang digunakan. Pada penelitian Kusuma dan Syafruddin (2014) obyek yang digunakan semua partisipan ajang penghargaan Indonesian Sustainability Reporting Award (ISRA). Sedangkan pada penelitian ini obyek penelitian yang digunakan adalah semua perusahaan real estate yang terdaftar di BEI. Adapun periode penelitian yang dilakukan oleh Utomo dan Rahardjo (2014) adalah tahun 2009-2011 sedangkan penelitian ini dilakukan periode 2012-2014. Dan peneliti

menambah variabel independen yaitu *Intellectual Capital* dan *Good Corporate Governance*.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD) merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan perusahaan dengan *stakeholders* dan disarankan bahwa CSRSD merupakan jalan masuk dimana beberapa organisasi menggunakannya untuk memperoleh keuntungan atau memperbaiki legitimasi. Dampak negatif tersebut akan berdampak pada nama perusahaan yang akan memberikan *image* buruk perusahaan di mata masyarakat. Perlu disadari juga bahwa proses pemanfaatan SDA ini tidak akan berhasil jika tidak di dukung oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sehingga merupakan suatu keterikatan secara tidak langsung untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat lingkungan sekitarnya.

Pada penelitian ini obyek yang di gunakan adalah perusahaan real estate yang terdaftar di BEI. Alasan digunakannya perusahaan real estate dan Property adalah bahwa Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa penjualan rumah jenis residensial mengalami penurunan karena dampak dari kebijakan '*loan to value*' (LTV) atau pembatasan pembayaran uang muka dari 20 persen menjadi 30 persen sejak pertengahan 2012. Penjualan tersebut mengalami penurunan sebesar 46,27 persen dibandingkan pada volume penjualan triwulan sebelumnya.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Realestate dan Property berturut-turut selama periode 2012-2014, dan mempunyai data yang lengkap terkait dengan variabel penelitian. Alasan menggunakan perusahaan non keuangan adalah untuk lebih memperkaya variasi sampel, sehingga hasil penelitian

dapat digeneralisasi pada macam-macam sector perusahaan, tidak terbatas pada satu sektor saja, dan tentunya akan dapat lebih menggambarkan keadaan perusahaan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka secara spesifik masalah penelitian ini dapat dirumuskan dengan kalimat pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *Intellectual Capital* terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah terdapat pengaruh antara *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah manajemen laba akan memoderasi pengaruh antara *Corporate Social Responsibility*, *Intellectual Capital* dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh antara *Intellectual Capital* terhadap kinerja keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh antara *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan.

4. Untuk menganalisis apakah manajemen laba akan memoderasi hubungan antara *Corporate Social Responsibility*, *Intelectual Capital* dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan tentang pentingnya mekanisme penerapan *Good Corporate Governance*. Dengan penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memberi pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang tercermin dari menurunnya tingkat rekayasa yang dilakukan manajemen. Di samping itu penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stake holders*.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan teori, terutama mengenai penerapan GCG dalam melakukan kinerja keuangan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Pihak Perusahaan/Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi manajemen mengenai mekanisme *Good Corporate Governance* serta mendorong pelaksanaan GCG untuk menjadi lebih baik.

b. Bagi Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan tahunan, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan investasi.